

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan
Sulawesi Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S1)
Dalam Akuntansi Syari'ah



OLEH

RIFKAYANTI AMRULLAH

1505046040

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) ekla

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rifkayanti Amrullah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rifkayanti Amrullah

NIM : 1505046040

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2019

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Ratno Ariyanto, M.Si., CPA
NIP. 19800128 200801 1 010


Desy Noot Farida, SE., M.Si
NIP. 19791222 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: feki.walisongo.ac.id – Email: fekiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Rifkayanti Amrullah
NIM : 1505046040
Judul : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)

Telah di ujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat sangat baik, pada tanggal :


16 September 2019

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Jurusan Akuntansi Syariah tahun akademik 2019/2020.

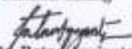
Semarang, 16 September 2019

Mengetahui,

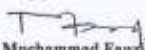
Ketua Sidang


Dra. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004


Sekretaris Sidang


Dr. Ratna Agrianto, M.Si., CPA
NIP. 19800128 200801 010

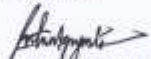
Penguji I


Muchammad Fauzi, S.E., M.M
NIP. 19730217 200604 1 001


Penguji II


Dr. W. Imam Yahya, M.A
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing I


Dr. Ratna Agrianto, M.Si., CPA
NIP. 19800128 200801 1 010

Pembimbing II


Dessy Noor Farida, SE., M.Si
NIP. 19791222 201503 2 001

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ

“Dan Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, Maka Sesungguhnya kebaikan tersebut adalah untuk dirinya sendiri”.

(Qs. Al-Ankabut : 6)

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”

(Ernest Newman)

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terimakasih saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya kasihi dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta Papa (Santo Amrullah) Mama (Masrati Latolando) yang telah memberikan doa dan dukungan dengan baik selama ini.
2. Adik (Dias Safitri Amrullah) yang senantiasa menyemangati
3. Keluarga Besar Amrullah dan Latolando yang selalu memberikan doa dan dukungan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah/pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2019


Rafiq

Rafiqyami Amrullah

NIM. 1505046040

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan pedoman buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014.

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ---	A
اِ---	I
اُ---	U

C. Diftong

اي	Ay
او	Aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya *الطَّبَّ* *at-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya *الصناعة* = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta'* marbutah ditulis dengan "h" misalnya *الطبيعية المعيشة* = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRACT

This research was aimed at finding out and analyzing the influences of accountability and transparency to the Village Fund's management in the Banggai Kepulauan Regency, Central Sulawesi. The method of this research used quantitative method with the descriptive analysis and multiple linear regression analysis as its techniques. This sample of this research used the limited population technique which was the researcher took the sample from the 85 villages in Banggai Kepulauan Regency. The primary data was obtained by distributing questionnaires and conducting interview. Meanwhile the secondary data was obtained by studying literature. The results of this research showed that first Accountability has a positive and significant influences to the Village Fund's Management, second Transparency has a positive and significant influences on Village Fund's Management.

Keywords : *Akuntability, transparency, village fund's management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis linear berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik limited population yang diambil dari desa-desa yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 85 desa. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Kedua, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan indah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang atas terciptanya sistem akademik yang mendukung penulis untuk menjadi mahasiswa yang terus belajar dan berkarya serta mampu bersaing di masyarakat.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

3. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku wali dosen yang telah memberikan fasilitas belajar selama masa perkuliahan sampai memberikan restu pada penelitian ini.
4. Dr. Ratno Agrianto, M.Si., CPA dan Dessy Noor Farida, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi, mengarahkan penulis, dan mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya.
5. Warno SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah serta seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan wawasan, membantu dalam segala hal serta selalu sabar menuntun dan memotivasi penulis hingga sampai tahap skripsi dan mampu menyelesaikannya.
6. Keluarga Besar DPM-PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan terimakasih telah memberikan izin penelitian, khususnya Kak Asrudin Bakara yang sudah banyak membantu saya dalam hal penelitian.
7. Teman, kawan, lawan, percetakan dan transportasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh

karena itu penulis mengharap kritik dan saran konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 Juli 2019

Rifkayanti Amrullah

NIM. 1505046040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.i
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1	Akuntabilitas	11
2.1.1	Pengertian Akuntabilitas	11
2.1.2	Tujuan Akuntabilitas	13
2.1.3	Jenis-jenis Akuntabilitas.....	14
2.1.4	Indikator Akuntabilitas.....	17
2.1.5	Akuntabilitas dalam Perspektif Islam.....	17
2.2	Transparansi	20
2.2.1	Pengertian Transparansi	20
2.2.2	Prinsip-prinsip Transparansi.....	23
2.2.3	Indikator Transparansi.....	23
2.2.4	Transparansi dalam Perspektif Islam.....	25
2.3	Desa.....	27
2.3.1	Pengertian Desa.....	27
2.3.2	Keuangan Desa.....	30
2.3.3	Dana Desa.....	33
2.3.4	Pengelolaan Keuangan Desa	37
2.4	Penelitian Terdahulu.....	42
2.5	Perumusan Hipotesis	45

2.5.1	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa	45
2.5.2	Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa	46
2.6	Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN		49
3.1	Jenis dan Sumber Data	49
3.2	Populasi dan Sampel	50
3.2.1	Populasi	50
3.2.2	Sampel	51
3.3	Metode Pengumpulan Data	55
3.3.1	Angket (Kuesioner).....	55
3.3.2	Dokumentasi.....	56
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran	56
3.5	Teknik Analisis Data.....	62
3.5.1	Uji Kelayakan Data	62
3.5.2	Analisis Deskriptif.....	65
3.5.3	Metode Analisis Regresi Berganda	65
3.5.4	Uji Asumsi Klasik	67
3.5.5	Pengujian Hipotesis.....	71

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	74
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Banggai Kepulauan 74
4.2	Analisis Deskriptif..... 77
4.2.1	Karakteristik Responden 78
4.2.2	Jawaban Responden 80
4.3	Uji Kelayakan Data 86
4.3.1	Uji Validitas 86
4.3.2	Uji Reliabilitas..... 87
4.4	Uji Asumsi Klasik 88
4.4.1	Uji Normalitas 88
4.4.2	Uji Multikolinearitas 91
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas 92
4.5	Analisis Regresi Berganda 93
4.6	Pengujian Hipotesis..... 96
4.6.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji <i>t</i>) 96
4.6.2	Uji Signifikansi Parsial (Uji <i>F</i>)..... 98
4.6.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2) 100
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian..... 101
BAB V PENUTUP	106
5.1	Kesimpulan..... 106

5.2	Keterbatasan Penelitian	107
5.3	Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	42
Tabel 3.1	51
Tabel 3.2	59
Tabel 3.3	68
Tabel 4.1	78
Tabel 4.2	79
Tabel 4.3	80
Tabel 4.4	82
Tabel 4.5	84
Tabel 4.6	86
Tabel 4.7	88
Tabel 4.8	90
Tabel 4.9	91
Tabel 4.10	93
Tabel 4.11	96
Tabel 4.12	90
Tabel 4.13	98
Tabel 4.14	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1.....	47
Gambar 4.1	75
Gambar 4.2	76
Gambar 4.3	89
Gambar 4.4	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era milenial ini perhatian terhadap desa di Indonesia semakin meningkat, salah satunya tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan isu penting karena mulai tahun 2015 sejak desa menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang setiap tahunnya meningkat. Sekertaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan, tiap desa akan menerima Dana Desa sekitar Rp 1 Miliar pada tahun 2017.¹ Implikasi dari besarnya Dana Desa mendorong pemerintah desa untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi secara transparan dan akuntabel. Khususnya di kabupaten Banggai Kepulauan kebijakan pemerintah mengalokasikan ADD maupun DD langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah pedesaan yang selama ini tertinggal. Pengelolaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

¹www.beritasatu.com/makro/388959-kemendes-2017-dana-desa-capai-1-miliar.html, Di akses 07 Desember 2018

selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa sebagai suatu elemen terkecil dari unsur-unsur pemerintahan. Desa juga masih membutuhkan pembaharuan agar menjadi desa yang maju serta tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan desa.³ *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektifitas.⁴ Penggunaan prinsip *Value for Money* dapat

² Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2016), h. 2.

³ Rahmi Fajri, dkk, *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 7, Malang, 2015, h 1.

⁴ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, Yogyakarta: CV Andi Offset. 2002, h. 4.

digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki anggaran sektor publik. Adanya beberapa kasus pengelolaan dana desa yang kurang baik, menandakan bahwa dalam pelaksanaan penganggaran di sektor publik harus didasarkan pada pelaksanaan akuntabilitas, transparansi.

Dana Desa merupakan salah satu cara mewujudkan *good governance* yang baik. Dimana masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan yang erat, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Prinsip-prinsip *good governance* diantaranya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan semua warga masyarakat yang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintahan, serta visi strategis para pemimpin masyarakat.⁵

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*oppenes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi

⁵ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/12>, di akses 27 Juli 2018

terutama informasi keuangan harus dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisaa :58)

Pada ayat diatas Allah SWT menyuruh kita untuk berlaku adil dan transparan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Adil dalam menempatkan sesuatu sesuai posisinya

Desa pada dasarnya dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam pengelolaan keuangannya harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun permasalahan yang terjadi di kabupaten Banggai Kepulauan pada beberapa desa pemerintahannya maupun

⁶ Sri Ayu Wulandari Aswadi, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transpaaranssi Terhadap Kualitas laporan keuangan Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pinrang", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, h. 1

pengelolaan keuangannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya yaitu belum adanya pelaksanaan musyawarah desa, dimana musyawarah desa merupakan salah satu akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa belum tepat sasaran. Dikarenakan desa menggunakan dana ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat. Pada dasarnya Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dapat digunakan selain pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat contohnya pada Permendagri No 114 Tahun 2015 yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Regulasi tentang pemerintahan desa yang di atur dalam permendagri 113 tahun 2014 tentang pembangunan desa maupun aturan lainnya tentang LKPP, pijakan dasar pengelolaan keuangan desa berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang berasal dari musyawarah desa (Musdes) yang kemudian di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Forum musdes bersumber dari aspirasi seluruh

masyarakat desa tentang program desa yang berasal dari aspirasi masyarakat. Agar pemerintah desa dan masyarakat bisa mandiri mengelola desanya dan menjadi desa mandiri.

Dalam beberapa situasi, penggunaan Dana Desa rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui DD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu menjalankan amanah dalam mengelola anggaran tersebut dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa di Banggai Kepulauan jauh dari desa mandiri. Salah satu sumber dari tim pendamping desa, menyebutkan oknum Dinsos-PMD Banggai Kepulauan memanipulasi pengelolaan ADD/DD. Seluruh kegiatan baik itu pengadaan, serta monitoring dan evaluasi bukan merupakan usulan masyarakat desa yang dibuktikan dengan acara musyawarah desa yang tertuang dalam RKPDes. Sementara itu, Kepala Dinsos-PMD Kabupaten Banggai Kepulauan Muchsin Sasia, mengaku dinas harus turut campur dalam pengelolaan DD maupun ADD. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan dan program desa semakin baik. “Tahun 2015 dan tahun 2016”, pengelolaan dana desa di Banggai Kepulauan rusak dan sudah banyak kepala desa

yang terjerat hukum. Bahkan ada kepala desa yang membawa lari uang setelah dicairkan.⁷

Fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu di tahun 2015 terjadi penyalahgunaan dana ADD dan DD sebesar Rp 200 juta oleh mantan kepala desa Meselesek, di tahun 2016 juga terjadi penyalahgunaan dana ADD dan DD oleh tiga kepala desa dari desa yang berbeda dan telah diproses di awal tahun 2018.⁸ Di tahun 2017 juga terjadi penggelapan Dana Desa sebesar Rp 4.9 M dengan alasan untuk biaya monitoring dan pengadaan buku perpustakaan desa.⁹

Adanya kasus-kasus seperti di atas menunjukkan jika manajemen dari desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan belum dikelola dengan baik karena belum berjalannya fungsi perencanaan dan pengendalian dan masih belum dipahaminya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya desa-desa melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran, adapun wujud dari ketiga prinsip tersebut adalah dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan

⁷ <http://radarsultengonline.com/2017/08/03/rp-8-miliar-dana-desa-tidak-sesuai-aspirasi-desa/>. Di akses 21 September 2018.

⁸ <https://media.alkhairaat.id/korupsi-dana-desa-kades-gantian-jadi-pesakitan/>. Di akses 06 Desember 2018.

⁹ <http://www.radarnusantara.com/2018/02/kpk-patut-periksa-dana-desa-kabupaten.html>. Di akses 06 Desember 2018.

anggaran harus akuntabilitas dan transparansi mengingat salah satu elemen penting dari perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengelolaan anggaran yang baik.

Dari latar belakang diatas dengan adanya permasalahan maka banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga

dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik ADD maupun DD.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teori mengenai akuntabilitas dan transparansi, pengertian desa, pengelolaan keuangan desa

BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisa data.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Berisi tentang penyajian data, serta analisis data dan interpretasi data sesuai dengan masalah yang ada.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Akuntabilitas

1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.¹⁰

Menurut Gray *et al* dalam disiplin akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau

¹⁰¹⁰ Risyia Umami dkk, *6 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, h. 75.

kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggungjawab dari sebuah organisasi atau perusahaan.¹¹

Menurut Rasul dalam bukunya akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam satu organisasi.¹²

Sumpeno dalam bukunya mengatakan bahwa akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.¹³

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar akuntabilitas merupakan sebuah tanggungjawab oleh suatu lembaga organisasi yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Alimudin (2011)

¹¹ Fordebi, ADESy. *“Akuntansi Syariah, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1. 2016, h. 224.

¹² Syahrudin Rasul, *“Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran”*, Jakarta: Detail Rekod. 2002, h. 8.

¹³ Lina Nasehatun Nafidah, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 10. 2017, h. 275.

keadilan sebagai salah satu indikator yang menjadi harapan umat.

Khalifah Umar Bin Abdul Aziz berkata bahwa :

“jika para penguasalah yang berlaku adil, baru kemudian rakyat. Jika hal tersebut terwujud, maka keadilan menjadi tanggungjawab bersama. Abadilah seorang penguasa berdosa karena melakukan suatu kezaliman, maka rakyat juga ikut berdosa jika tidak mau mengontrol dan mengawasinya. Bahkan menurut khalifah Umar Bin Abdul Aziz, rakyat yang tidak mau melakukannya berhak mendapat sanksi hukuman, apalagi jika mereka tidak mengingkari kemaksiatan atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa”, (Ahal, 2002. 100).¹⁴

1.1.2 Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Ghartey bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang

¹⁴ *Ibid.*, h. 235.

mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.¹⁵

Dari tujuan akuntabilitas di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

1.1.3 Jenis-jenis Akuntabilitas

Dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” karya Ihyaul Ulum, ada dua jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai sasaran pertanggungjawaban dimana sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Apabila ketiga komponen tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi yang ada dilaporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban.

¹⁵ J.B Ghartey, “*Akuntansi Keuangan Daerah*”, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h. 308

2. Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas kinerja dilihat dari perspektif islam menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat nabi yaitu *amanah* dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori agensi dari akuntansi itu sendiri. Bila dilihat dari sisi lain maka akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut pandang stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).¹⁶ Seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72-73 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
 أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
 جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk

¹⁶ Ilham Ulum, “Akuntansi Sektor Publik”, Malang: UMM PRESS, 2010, h. 41

memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”, “sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.

(QS. Al-Ahzab : 72-73)

Dari ayat diatas Allah SWT berfirman “sesungguhnya aku memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung tetapi mereka tidak menyanggupinya lalu Allah SWT memberikan amanah itu kepada nabi Adam As, dan disanggupi oleh nabi Adam”. Sedangkan amanah yang dimaksud diatas yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh manusia baik perkara agama maupun perkara dunia. Dan hal ini meliputi pergaulan dengan manusia, janji-janji dan sebagainya. Amanah yang diberikan kepada manusia harus dilaksanakan dan dilarang mengkhianati semua amanah yang telah diberikan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik amanah.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan

dana desa (DD) kepada masyarakat dimana kepala desa merupakan penanggung jawab utama.

1.1.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin indikator akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur
4. Adanya standar operating procedure dan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kawenangan/pelaksanaan kebijakan
5. Mekanisme pertanggungjawaban
6. Laporan tahunan
7. Laporan pertanggungjawaban
8. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
9. Sistem pengawasan
10. Mekanisme reward dan punishment.¹⁷

1.1.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Masyarakat yang hidup bersama pada suatu tempat dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan ekonomi dan kemandirian di lingkungannya. Masyarakat yang saling toleransi

¹⁷ <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/04/aspek-aspek-akuntabilitas/>. Di akses 03 Maret 2019.

dan peduli terhadap pemerataan pembangunan mampu menjadikan suatu desa/daerah menjadi terorganisir dengan baik dan berjalan sesuai yang ditetapkan/diinginkan. Adanya struktur dari pemerintahan desa agar membantu pemerintah daerah mewujudkan tujuan bersama dalam membangun bangsa menjadi lebih baik dan sejahtera.¹⁸ Seorang pemimpin wajib memiliki hati yang melayani atau akuntabilitas (accuountable). Istilah akuntabilitas yang penuh tanggungjawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan pikiran dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT kelak di akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar. Mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti.¹⁹

Pemerintah yang baik dan amanah dalam islam tidak hanya dilihat dari pemerintahannya yang dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai

¹⁸ Vica Mayela Laurentya, Skripsi. *“Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat”*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 38-39.

¹⁹ Alfian Hamid, Skripsi. *“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) dalam Pencapaian Good Governance”*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), h. 27.

suatu mufakat, akan tetapi harus dilandasi dengan keadilan dalam menetapkan hukum. Seperti yang tercantum dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.
(QS. AN-Nisa' : 58)

Makna dari ayat diatas yaitu perintah Allah SWT kepada pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang diberikan amanah itu. Pada ayat diatas dijelaskan bahwa menyampaikan amanah dan menetapkan perkara diantara manusia harus dengan cara yang adil. Amanah yang dimaksud pada ayat diatas ada beberapa yaitu amanah mengenai ilmu, amanah Allah kepada hambanya, amanah terhadap sesama manusia, amanah manusia terhadap diri sendiri.

Terkhusus untuk masalah pemerintahan dan urusan negara pemimpin atau pemegang amanah harus benar-benar amanah dalam menjalani kepemimpinan.

Konsep akuntabilitas dalam islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang menyangkut pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun hasilnya. Dengan adanya prinsip akuntabilitas tersebut maka pekerjaan yang dibebankan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.²⁰

1.2 Transparansi

1.2.1 Pengertian Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Transparansi berarti keterbukaan (*opennes*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang

²⁰ Razia Ulfa, Skripsi. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 13.

membutuhkan informasi. Dari pengertian diatas transparansi memiliki arti memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk memiliki akses yang sama yaitu untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.²¹

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk meperoleh informasi tentaang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Lalolo dalam buku yang ditulisnya transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang di capai.²²

Didjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui

²¹ Mardiasmo, *“Akuntansi Sektor Publik”*, Yogyakarta: Andi Offset. 2010, h. 30.

²²Krina Loina, Lalolo, *“indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi”*, Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2003, h. 13.

oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.²³

Menurut Annisaningrum transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria : adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kerja.²⁴

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi kebohongan sulit disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi

²³ Mustopa, Didjaja, "*Transparansi Pemerintah*", Jakarta: Renika Cipta. 2003, h. 261

²⁴ Annisaningrum, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. <http://ovy19.wordpress.com>. Di akses 12 Desember 2018.

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.²⁵

1.2.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, prinsip transparansi dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Tomo Viktoria dalam bukunya Liona Lalolo Krina telah mengemukakan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut :

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

1.2.3 Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut Adrianto yang menjabarkan dari IDASA, terdiri dari :

1. Ada tidaknya kerja hukum bagi transparansi

²⁵ 'Izzuddin Arridlo, Skripsi. *“Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan dengan Internet FinancialReporting Berbasis Website pada Pemerintah Desa Jawa Timur”*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 19.

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci manajemen fiscal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikan hasil anggaran (yang telah di audit lembaga yang berwenang).
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiscal.
 - e. Terbukannya informasi tentang pembelajaran actual.
 3. Adanya audit yang independen dan efektif
 - a. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas .
 - b. Adanya sistem peringatan dini (early warning system).
 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

- a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
- b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penganggaran.²⁶

1.2.4 Transparansi dalam Perspektif Islam

Konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam hal amanah dan tanggungjawab serta keterbukaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa seseorang atau instansi pemerintah hendaknya mengacu pada konteks keislaman. Seperti yang tercantum dalam Al-qur'an surah Al-Anfal ayat 27 antara lain :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعَلَّمُوْنَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.(QS. Al-Anfal ayat 27)

Dari ayat diatas terdapat dua poin pelajaran yang dapat diambil yaitu :

1. Komitmen terhadap iman menjadikan seseorang komitmen dalam menjaga amanah. Karena iman tidak akan bisa bergabung dengan penghianatan.

²⁶ Adrianto, Nico. “*Transpaaransi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*”,Malang: Bayumedia Publishing. 2007, h. 21.

2. Berkhianat merupakan perilaku buruk dan kotor. Karena itu, barangsiapa yang melakukan penghaianatan dengan sadar, maka balasan dan siksaan sangat pedih.²⁷

Transparansi merupakan salah satu amanaah yang diberikan Allah SWT kepada para pemimpin. Dari ayat diatas Allah SWT menyatakan wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu, baik itu amanah dari orang lain ataupun amanah dari Allah SWT. Apa yang diamanahkan harus dijaga dan dilaksanakan. Salah satu motivasi mengkhianati amanah yang diberikan adalah cinta kepada harta yang berlebihan. Allah menyatakan harta adalah titipan yang merupakan anugerah dan itu hanyalah cobaan maka janganlah berlebihan dalam mencintai harta melebihi cintamu pada Allah SWT.

Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

²⁷ Oktayana Yuda Sakti, Skripsi. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek”. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 26.

Artinya : “dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”.(QS. An-Nahl ayat 101).²⁸

Dari ayat diatas mencerminkan bahwa seorang pemimpin harus terbuka dan mengatakan yang sesungguhnya tanpa mengurangi atau melebihkan sehingga masyarakat yang dipimpin akan menerima dengan terbuka tanpa merasa dicurangi.

1.3 Desa

1.3.1 Pengertian Desa

Menurut Yustika dan Baks desa secara umum mempunyai gambaran tiga karakteristik yang bisa dideskripsikan sebagai berikut: pertama, aspek budaya. Secara umum indikator atas budaya yang ada di Indonesia terdiri dari, etos kerja, perilaku sehari-hari orang-orang yang ada di dalamnya dan spirit wirausaha. Kedua, aspek ekonomi. Secara keseluruhan, karakter ekonomi di desa diindikasikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi. Ketiga, jika dilihat dari sudut pandang sosial, tingkat

²⁸ Arista Widiyanti, Skripsi. “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 30.

pendidikan yang merupakan salah satu indikator yang ada di desa masing-masing tergolong sangat rendah.²⁹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Menurut Widjaja dalam bukunya mengatakan mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) lembaga masyarakat desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok

²⁹ Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks. *“Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan Pertanian dan Kedaulatan Pangan”*. Malang: Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing). 2015, h. 7-10.

³⁰Chomariyah dkk. *“KeuanganDesa Pesisir, Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif”*, Malang: Inteligencia Media. 2016, h. 10.

masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintah serta dalam rangka menumbuhkan kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.³¹

Menurut Sriartha dalam bukunya, berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

1. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, masyarakatnya memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa

³¹ HAW Widjaja, *“Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005, h. 24

swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencarian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat sarana dan prasarana lengkap dan modern.³²

1.3.2 Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta ssegala sesuatu berupa uang dan

³² Sriartha, *“Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa”*, Bandung: FPPD. 2005, h. 13.

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.³³

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sumber kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dana dari hasil BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan di danai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan pemerintah desa di danai oleh APBN.³⁴

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan program serta kegiatan desa. Keuangan desa

³³ Joko Hadi Susilo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Mewujudkan Good Governance*, Skripsi, h. 28.

³⁴ Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, *Akuntabilitaas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi Akuntansi, Vol. 4 No. 8. 2015, h. 4

dikelola atas dasar azas-azas transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³⁵

Menurut Nurcholis menjelaskan bahwa keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga penyelenggaraan semua urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDesa dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh APBD sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah di danai oleh APBN.³⁶ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber dari pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%.

³⁵ Deti kumalasari dan Ikhsan Budi Raharjo, *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, h. 4.

³⁶ Hanif, Nurcholis, "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*", Jakarta: Erlangga, 2011. h. 81

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10%.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

1.3.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 huruf b UU No 6/2014 tentang Desa.³⁷

Dasar hukum dana desa diawali dengan adanya undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, PP No 43 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui melalui PP No 47 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang kemudian di perbaharui menjadi PP No 22 Tahun

³⁷ www.keuangandes.com/2015/01/megawal-dana-desa/. Di akses 12 Desember 2018.

2015. Selain Undang-Undang dan PP tersebut terdapat juga dasar hukum lain mengenai desa yaitu :

1. Permendagri : (a) Permendagri No 111/2014 tentang teknis peraturan di desa; (b) Permendagri No 112/2014 tentang pemilihan kepala desa; (c) Permendagri No 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa; (d) Permendagri No 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa.
2. Permendes : (a) Permendes No 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2016; (b) Permendes No 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; (c) Permendes No 2 T/2015 tentang musyawarah desa.
3. PMK 247/PMK.7/2015 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, peyaluran, pemantauan, dan evaluasi dana desa).³⁸

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka,

³⁸Ahmad Soleh, dkk. *“Persepsi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Dana Desa di Kecamatan Barat Kabupaten Seluma”*, (Bengkulu: Universitas Dehasen Bengkulu. 2017), h. 117

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.³⁹

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan April sebesar 40%,
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%, dan
- c. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.⁴⁰


Pengalokasian Dana Desa yaitu 90% dibagi rata kesemua desa, sedangkan 10% memperhitungkan variabel yang mempengaruhi. Dana desa digunakan untuk pembangunan dan

³⁹Razia Ulfa, Skripsi. *"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi"*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 33

⁴⁰Fadhil Azhar, Skripsi. *"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa"*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), h. 25

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.⁴¹

Pemberian Dana Desa (DD) merupakan tanggungjawab yang besar pemerintah terhadap desa dan masyarakat. Sehingga pemerintah desa dalam pemberian kewenangan dalam mengurus sendiri dana desa yang telah ada, dalam hal ini perlu adanya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Seperti dalam Al-Qur'an surah As-Syuara' ayat 215 mengenai rasa tanggungjawab, sebagai berikut:


 وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman”. (QS. Asy-Syuara: 215).⁴²

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa seorang pemimpin dilarang bersikap sombong kepada masyarakatnya, haruslah bersikap lemah lembut, bertutur kata yang halus kepada mereka.

Dana Desa sebagai salah satu bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015).

⁴¹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, “*Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*”, (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2015), h. 13

⁴² Al-Quran dan Terjemahannya, *QS Asy-Syuara*, ayat 215.

Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut tertuang dalam Permendagri N0 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan Dana Desa, diperlukan aspek kompetensi yang dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila aparatur gagal memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak tepat serta dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.⁴³

1.3.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan
 - a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

⁴³Larastika Medianti, *“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa”* JOM FEB, Vol. 1, Ed. 1, Riau, 2018, h 2.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari jam kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
 - g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
2. Pelaksanaan
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan

dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.

- g. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - h. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan
 - a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama.
 - b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir.
5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

 - a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.
 - c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan pengawasan
 - a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dan desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.⁴⁴

⁴⁴ Teguh Arifiyadi, “*Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*”. 2008, Jakarta Indonesia.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini. Di antaranya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Risky Amalia Sugista	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (2017)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, keuangan desa, pembangunan	Kuantitatif dengan penyebaran kuisioner	Variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh secara simultan
2	Nuzul Ibnu	Pengaruh	Transparansi	Kuantitatif	Transparansi

	Hajar	Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran pada UPTD Taman Budaya Selawesi Tenggara (2017)	, Akuntabilitas, dan kinerja		dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD taman Budaya Sulawesi Tenggara
3	Arista Widiyanti	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi pada Desa Sumberejo dan Desa	Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Alokasi Desa	Kualitatif	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sumberejo dan

		Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan (2017)			Kandung sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014
4	Risya Umami & Idang Nurodin	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa (2017)	Transparansi , akuntabilitas dan Pengelolaan keuangan desa	Kuantitatif dengan penyebaran kuisisioner dengan metode deskriptif asosiatif	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa
5	Justita Dura	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,	Akuntabilitas, kebijakan desa dan kelembagaan desa	Kuantitatif dengan pendekatan sebab akibat	Alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan

		Kebijakan Desa dan Kelembag aan Desa terhadap Kesejahter aan Masyaraka t (2016)			terhadap kesejahteraa n masyarakat dan terdapat pengaruh secara bersama- sama (simultan) anantara ketiga variabel tersebut
--	--	---	--	--	---

1.5 Perumusan Hipotesis

1.5.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang harus atau perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku pengelola keuangan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam penelitian Risky Sugista (2017) mengatakan bahwa pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan

masyarakat. Jadi, apabila semakin baik akuntabilitas maka akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian terdahulu ini maka peneliti memberikan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

1.5.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Selain akuntabilitas transparansi juga menjadi salah satu pertimbangan. Transparansi adalah keterbukaan atau tidak merahasiakan pengelolaan keuangan dari masyarakat. Dengan adanya transparansi diharapkan dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa. Dari penelitian Risyah Umami dan Idang Nurodin mengatakan bahwa transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantara prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa). Pada penelitian Arista Widiyanti (2017) mengatakan bahwa desa Sumberejo dan Desa Kandung telah melaksanakan sosialisasi terkait keuangan desa kepada

masyarakat. Dari uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

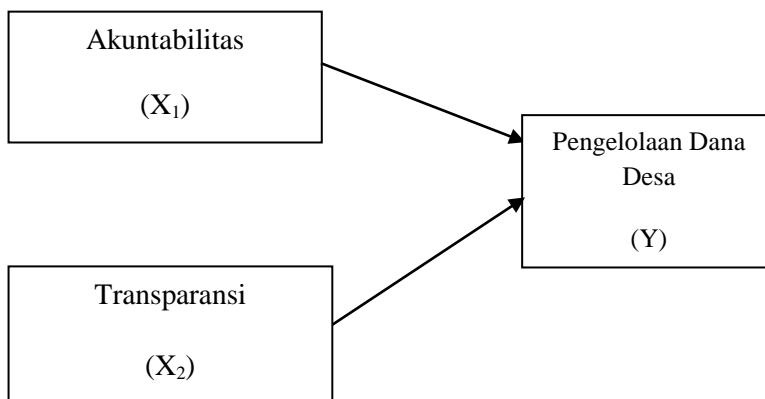
H₂ : Transparansi berpengaruh Positif terhadap pengelolaan dana desa

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang dipakai sebagai acuan agar peneliti memiliki arah yang sesuai dengan tujuan peneliti yaitu :

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan diatas akuntabilitas merupakan variabel X₁ yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang merupakan variabel Y dimana semakin baik suatu laporan pertanggungjawaban maka akan semakin berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan variabel X₂ yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Y) dimana jika semakin transparansi kinerja dari pemerintah desa

maka akan semakin berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mnguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁵ Sementara itu sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan, seperti wawancara atau hasil pengisian kuisisioner.⁴⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu mengambil data dari perangkat desa dan unit organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa serta menggunakan kuisisioner yang dijawab secara tertutup oleh perangkat desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua

⁴⁵ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2016

⁴⁶ M. Ma'rufAbdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk:Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, h. 246

atau sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.⁴⁷ Dalam penelitian ini sumber data sekundernya meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

1.2 Populasi dan Sampel

1.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁸ Jadi, populasi itu adalah keseluruhan objek yang dijadikan sasaran penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, populasi mengacu pada perangkat desa, di desa-desa yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan. Dikarenakan banyak desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dan penulis telah melakukan pra riset, maka penulis memutuskan melakukan pengambilan sampel pada penelitian ini.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 128

⁴⁸ Afifatun Nisa', Skripsi : *"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah"* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 48

⁴⁹ *Ibid*, h. 226

1.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁰ Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan diatas merupakan dua kata kunci dan menunjuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya.⁵¹ Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang di kabupaten Banggai Kepulauan. Berikut ini adalah jumlah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	
1	Totikum	1. Kombutokan 2. Lopito 3. Abason 4. Tone 5. Sambiu	6. Sakai 7. Bolonan 8. Sobonon 9. Sampaka 10. Salangano 11. Batangbabasal

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012

⁵¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, dan Penelitian gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 159

2	Totikum Selatan	12. Kalumbatan 13. Kanali 14. Nulion 15. Peley 16. Tobungku 17. Tonuson	
3	Tinangkung utara	18. Palam 19. Luksagu 20. Ambelang 21. Baka 22. Bakalan 23. Bongganan 24. Bulungkobit 25. Bungin	26. Lalong 27. Manggalai 28. Poding- padding 29. Salakan 30. Tatakalai 31. Kautu 32. Tompudau 33. Saiyong
3	Tinangkung Selatan	34. Gansal 35. Kampung Baru 36. Mansamat A 37. Mansamat B	38. Paisu Mosoni 39. Tinangkung 40. Tobing

4	Peling Tengah	41. Alakasing 42. Balombong 43. Kolak 44. Koyobunga 45. Labib	46. Luk 47. Patukuki 48. Popisi 49. Tolulos 50. Tombos
5	Bulagi	51. Alul 52. Boloy 53. Komba-komba 54. Seasa 55. Sosom 56. Lalandai	57. Meselese 58. Montomisan 59. Oluno 60. Sumondung 61. Nolo
6	Bulagi Utara	62. Bakalinga 63. Bolubung 64. Koyo Bunga 65. Montop	66. Ombuli 67. Paisuluno 68. Sambulangun
7	Bulagi Selatan	69. Balalon 70. Bone Puso 71. Lemelu 72. Lolantang 73. Osan 74. Pala Batu I	75. Pala Batu II 76. Pandaluk 77. Sabelak 78. Tatarandang 79. Tori-tori 80. Unu
8	Liang	81. Apal 82. Bajo	88. Liang 89. Mamulusan

		83. Balayon 84. Basosol 85. Binuntuli 86. Boyomoute 87. Kindandal	90. Okumel 91. Popidolon 92. Sabati 93. Tangkop 94. Tomboniki
9	Buko	95. Batangono 96. Kambani 97. Labangun 98. Labasiano 99. Lalengan 100. Leme-leme 101. Leme-leme darat	102. Lumbi-lumbi 103. Malanggong 104. Paisu Batu 105. Palapat 106. Peling Lalomo 107. Seano 108. Tataba
Jumlah desa Kabupaten Banggai Kepulauan			108

Sumber: id.wikipedia, data diolah

Besaran sampel ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan

Menentukan besarnya sampel dengan batas ketelitian 5%,

$$n = \frac{108}{1 + (108)(0.05)^2}$$

$$n = \frac{108}{1 + (108)(0.0025)}$$

$$n = \frac{108}{1,27}$$

$n = 85,039$ dibulatkan menjadi 85

Jadi jumlah perangkat desa yang akan di jadikan sampel yaitu sebanyak 85,039 yang akan dibulatkan menjadi 85 orang dengan kriteria perangkat desa yang masih aktif di masing-masing desa di kabupaten Banggai Kepulauan. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar nantinya data yang diperoleh bisa lebih representatif.⁵²

1.3 Metode Pengumpulan Data

1.3.1 Angket (Kuesioner)

Angket atau kuisisioner merupakan suatu tehnik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup. Pada angket tertutup pertanyaan

⁵² *Ibid*, h..85

atau pernyataan sudah disusun secara berstruktur di samping ada pertanyaan pokok atau pernyataan utama, juga ada anak pertanyaan atau subpertanyaan. Dalam angket tertutup, pertanyaan atau pernyataan-pernyataan telah memiliki alternatif jawaban (*option*) yang tinggal dipilih oleh responden.⁵³

1.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama. Terlepas dari batas waktu, bahan-bahan dokumentasi itu merupakan informasi atau data yang memberikan peluang yang luas bagi penyelenggaraan penelitian. Dari bahan-bahan itu dapat dikemukakan berbagai fakta tentang sesuatu yang terjadi, berbagai teori, berbagai pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian kuantitatif biasanya bahan-bahan itu sebagai data sekunder dan mungkin saja dokumentar sebagai teknik utama, tergantung masalah dan tujuan penelitiannya.⁵⁴ Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa data pengelolaan keuangan desa.

1.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi

⁵³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017, h. 207

⁵⁴ Sofar Silaen & Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan tesis*, Jakarta: in Media, 2013, h. 163

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁵ Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁶ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2).

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, maka yang menjadi variabel Y dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa.⁵⁷

Untuk mengklasifikasikan variabel dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan

⁵⁵ *Ibid*, h..152

⁵⁶ Mochamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pres, 2009, h.. 145

⁵⁷ Rizky Amalia Sugista, “*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa*” Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017, h. 34, t.d.

langkah penelitian selanjutnya. Maka peneliti menggunakan skala pengukuran dengan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok.

Dalam mengukur jawaban responden pada kuisisioner pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa menggunakan skala likert, maka jawaban akan diberi skor dengan tingkatan sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 3.2
Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas (X ₁)	Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pertanggungjawaban • Pencatatan laporan keuangan • Penyajian laporan keuangan • Jujur • Adil 	Skala likert

<p>Transparansi (X₂)</p>	<p>Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi • penyediaan akses informasi • mekanisme yang memfasilitasi pelayanan publik • mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi • Amanah • Kejujuran 	<p>Skala likert</p>
---	---	---	---------------------

	dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.		
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalokasian sumber daya • operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas • laporan pertanggungjawaban 	Skala likert

Indikator yang disusun ini dilandasi dalam teori penelitian dan juga penelitian terdahulu oleh Rizky Amalia Sugista yaitu pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan.

Dalam pengukuran instrumen penelitian (kuisisioner) yang baik maka harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan pengujian kuisisioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuisisioner.
2. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator variabel.⁵⁸

Operasional variabel sangat diperlukan untuk menentukan indikator dan skala yang digunakan dari variabel-variabel yang terkait penelitian.

1.5 Teknik Analisis Data

1.5.1 Uji Kelayakan Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu instrumen yang dikatakan valid dengan arti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Menurut Gozali

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, h. 211-213, t.d.

(2016), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan *degree of freedom* (df) = n-2.⁵⁹ Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikan, jika signifikan < 0,50 (5%) maka instrumen tersebut dinyatakan valid, namun jika jumlahnya lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid.⁶⁰ Dalam penelitian ini rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut.⁶¹

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

X = pertanyaan nomor tertentu

Y = Skor total

⁵⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2016, h. 52-59. Edisi 8.

⁶⁰ Afifatun Nisa', "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*", Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibarahim, 2016, h. 53, t.d.

⁶¹ *Ibid*, h. 211-213

N = Jumlah responden

Uji hipotesis untuk validitas tiap pertanyaan suatu angket sebagai berikut :

H_0 = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktornya

H_1 = skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktornya dengan tingkat signifikansi 5% dengan $R_{hasil} \leq R_{tabel}$ = maka H_0 tidak ditolak, sedangkan jika $R_{hasil} > R_{tabel}$ = maka H_1 , butir pertanyaan valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas alpha, yaitu :

$$Rn = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right)$$

Dimana :

Rn = Relatif instrumen

K = Banyaknya pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians

σ^2 = Varians total

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *cronbach alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,70$. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.⁶²

1.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.⁶³ Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Pendeskripsian respons atau hasil observasi merupakan ciri khas dari bentuk pertama analisis.⁶⁴

1.5.3 Metode Analisis Regresi Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap

⁶²Rizky Amalia Sugista, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa”, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017, h. 43, t.d.

⁶³Ali Baroroh, *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS 15*, Jakarta : Alex Media Mumputindo, 2008, h. 1.

⁶⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 134.

variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa.⁶⁵ Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih. Adapun persamaannya yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan dana desa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

e = Standar error

Dimana Y adalah nilai terikat, α merupakan konstanta regresi, β adalah oefisien regresi, X merupakan nilai variabel bebas, dan e merupakan faktor pengganggu (error atau disturbance) yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi berganda.⁶⁶

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari

⁶⁵ Agustin Tyasminingsih, “Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (*E-Faktur*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo”, Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016, h. 59-60.

⁶⁶ Purbayu Budi Santoso & Muliawan Haamdani, *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*, Jogja: Erlangga, 2007, h. 282

akuntabilitas (X_1), dan transparansi (X_2), terhadap variabel terikat (Y) yaitu pengelolaan dana desa.

1.5.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan analisis parametrik melainkan menggunakan analisis non-parametrik. Namun, ada solusi lain jika tidak berdistribusi normal, yaitu dengan menambah lebih banyak atau mengurangi jumlah sampel.⁶⁷

Pada uji normalitas dalam penelitian ini rumus yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Pada uji Kolmogorov-Smirnov bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan sebagai upaya untuk menentukan ada dan tidaknya korelasi yang sempurna atau

⁶⁷Rambat Lupiyoadi & Ridho Bramulya Ikhsan, *Praktikum Riset Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2015, h. 134.

mendekati hubungan yang sempurna, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Kekuatan hubungan korelasi diukur berdasarkan skala r adalah 0 sampai dengan 1 (berlaku untuk r positif maupun negatif). Apabila skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan range yang sama, maka sifat hubungan korelasi dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Sifat hubungan Korelasi Berdasarkan Nilai r

Interval r	Sifat Hubungan
0,000 s/d 0,199	Sangat Lemah
0,200 s/d 0,399	Lemah
0,400 s/d 0,599	Cukup Kuat
0,600 s/d 0,799	Mendekati Sempurna
0,800 s/d 1,000	Sempurna

Berdasarkan tabel interval diatas, maka hubungan antara dua variabel bebas tidak mengandung multikolinearitas apabila nilai r kurang dari 0,8. Menurut Singgih Sentosa, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation*

Factor (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Hasan heteroskedastisitas berarti variasi (varian) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi random (acak) tetapi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas. Misalnya heteroskedastisitas akan muncul dalam bentuk residu yang semakin besar. Heteroskedastisitas yang ada dalam regresi dapat menyebabkan :

1. Penaksir (estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien, hal itu disebabkan variansnya sudah tidak minim lagi (tidak efisien).
2. Kesalahan baku koefisien regresi akan terpengaruh, sehingga memberikan indikasi yang salah dan koefisien determinasi memperlihatkan daya penjelasan terlalu besar.⁶⁸

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara

⁶⁸ Danang Sunyoto, *Praktik Riset Perilaku Konsumen (Teori Kisioner, Alat, dan Analisis Data)*, Cet 1, Yogyakarta : CAPS, 2014, h. 116-117.

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar analisis adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian.⁶⁹

Uji statistik yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas yaitu uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

⁶⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2011, h. 139

1.5.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel bebas (artinya akuntabilitas dan transparansi) secara individual tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pengelolaan dana desa)

$H_0 : \beta \neq 0$, artinya variabel-variabel bebas (artinya akuntabilitas dan transparansi) secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (pengelolaan dana desa)

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi,

- a. Apabila probabilitas signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima H_a ditolak. Artinya akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa.
- b. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi pengelolaan dana desa (untuk tingkat signifikansi = 5%).

c. Membandingkan nilai T_{hitung} dan T_{tabel}

Apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.⁷⁰

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji F)

Uji F bertujuan untuk apakah semua variabel independen yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F, dimana dengan melihat tingkat perbandingan antar nilai signifikan f dan nilai nyata (a), apabila signifikansi $F < a$ dan bila nilai $F_{hitung} > nilai F_{tabel}$, maka seluruh variabel bebas dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama.⁷¹

3. Uji Determinan (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R_{square} yang kecil berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dengan amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen

⁷⁰Agustin Tyasminingsih, "Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (*E-Faktur*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo", Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016, h. 61-62.

⁷¹Arikunto, Suharmi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 116

yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan nilai adjusted R pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.⁷²

Adjusted R^{-square} adalah nilai R^{-square} yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R^{-square} dan angka menjadi negatif. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R² sebagai koefisien determinasi.⁷³

⁷² *Ibid*, h. 95.

⁷³ Singgih Santoso, “*Menguasai SPSS 21 di Era Informasi*”, Jakarta: PT ELEK Media Komputundo, 2013, h 70

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Salakan. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki luas wilayah daratan 3.160,46 km² dan wilayah laut 18.828,10 km², Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini disebelah utara, teluk Solo di sebelah timur. Secara administratif terbagi atas 9 kecamatan, 6 kelurahan dan 108 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 158.617 jiwa. Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari rangkaian pulau-pulau yaitu 121 pulau, dengan rincian 5 pulau sedang yakni : Pulau Peleng (luas 2.340 km²), Pulau Banggai (286km²), pulau Bangkurung (145km²), pulau Salue Besar (82km²), pulau Labobo (80km²) dan 116 pulau-pulau kecil lainnya. Secara geografis kabupaten Banggai Kepulauan terletak di jazirah Timur Sulawesi, tepatnya diantara 1° ,06' - 2° ,20' LS dan 122° ,40' - 124° 13' Bujur Timur. Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu penghasil mutiara terbesar.

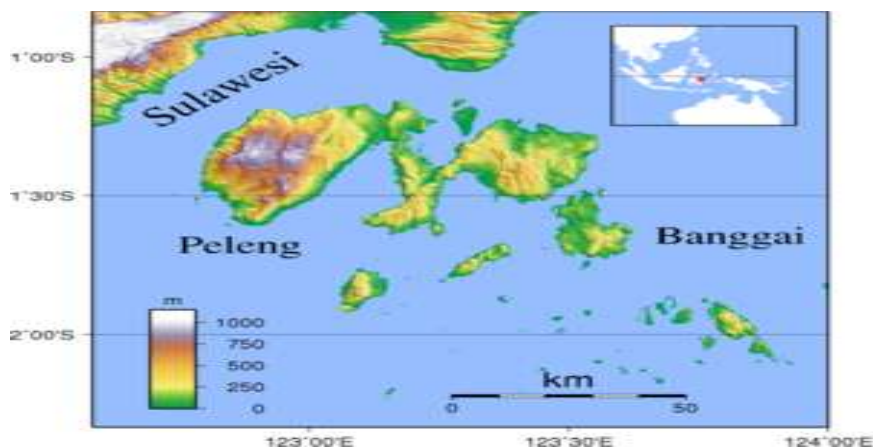
Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 3 November gubernur Sulawesi Tengah Brigjen Purn. H.B Paliudju atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya kabupaten Banggai Kepulauan yang sebelumnya masih bergabung dalam kabupaten

Banggai. Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi satu kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mencapai Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menggunakan berbagai jenis transportasi, ada tiga alternatif yang bisa dipilih. Pertama, Semarang-Surabaya-Makassar-Luwuk rute ini adalah rute tercepat untuk sampai ke Kabupaten Banggai Kepulauan, yang kedua Semarang-Surabaya-Makassar-Bau-bau-Banggai laut rute kedua ini akan memakan waktu lebih banyak karena menggunakan kapal KM. Sinabung yaitu selama tiga hari tiga malam, sedangkan rute ketiga yaitu Semarang-Makassar-Palu-Luwuk. Dari Luwuk ke Kabupaten Banggai Kepulauan bisa dengan menggunakan kapal cepat Marina Expres sekitar 1-2 jam atau dengan naik kapal kayu sekitar 4-5 jam atau juga bisa menggunakan kapal KMP Cakalang sekitar 8 jam. Adapun logo dan peta lokasi kabupaten banggai kepulauan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Logo Kabupaten Banggai Kepulauan

Sumber: Banggai Kepulauan 2013



Gambar 4.2 Peta Lokasi Kabupaten Banggai Kepulauan

Sumber : Wikipedia Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai Kepulauan juga mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagai berikut :

Visi :

“Membangun pemerintahan yang berkualitas, adil, demokratis dan bersih demi terwujudnya masyarakat Banggai Kepulauan yang sejahtera dan religius”

Misi :

- a. Meningkatkan penegakkan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.
- b. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

- c. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.
- d. Mengembangkan struktur ekonomi berbasis pedesaan yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.
- e. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahteraan anak, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.¹

1.2 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengambil populasi seluruh desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 108 desa sedangkan yang menjadi sampel ada 85 desa. Kuesioner yang dibagikan ada 85 kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan mulai 11 Januari sampai dengan 12 Februari 2019. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 85 (100%) kuesioner dan yang tidak dikembalikan sebanyak 0 (0%) kuesioner. Dengan demikian penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 7 butir pernyataan untuk variabel X dan 3 pernyataan untuk variabel Y. Jumlah keseluruhan pernyataan adalah 10 butir pernyataan. Dalam penelitian ini responden adalah perangkat desa di desa-desa

¹<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/>. Di akses 24 Maret 2019

yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun analisis deskriptif ini merupakan uraian mengenai hasil pengumpulan data primer (kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

1.2.1 Karakteristik Responden

Terdapat data responden yang diungkapkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan latar belakang serta sebagai kriteria sampel.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Presentasi (%)
Laki – laki	64	75,3 %
Perempuan	21	24,7 %
Jumlah	85	100 %

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 64 responden (75,3%) dan perempuan sebanyak 21 responden (24,7%). Hal ini

menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibanding dengan responden perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase (%)
21-30 Tahun	20	23,5%
31-40 Tahun	31	36,5%
41-60 Tahun	34	40,0%
Total	85	100%

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia 21-30 tahun berjumlah 20 orang (23,5%), responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 31 orang (36,5%) dan responden yang berusia 41-60 tahun berjumlah 34 orang (40,0%). Responden yang paling dominan adalah responden yang berusia 41-60 tahun karena pada saat peneliti menyebarkan kuesioner, peneliti lebih banyak menjumpai responden 41-60 tahun.

1.2.2 Jawaban Responden

1. Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel Akuntabilitas (X1)

Distribusi jawaban responden tentang variabel akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Variabel Akuntabilitas

Variabel	STS		TS		R		S		SS		Kata-rata	Total N	Total %
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
X1.1	0	0	0	0	1	1,2	54	63,5	30	35,3	4,34	85	100
X1.2	0	0	0	0	1	1,2	35	41,2	49	57,6	4,56	85	100
X1.3	0	0	0	0	1	1,2	39	45,9	45	52,9	4,52	85	100

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden untuk variabel akuntabilitas pada tabel 4.3 yaitu :

1. Pada pernyataan X1.1 dari kuesioner yang disebar dan dianalisis menyatakan bahwa indikator alat pertanggungjawaban desa sangat baik, dapat digambarkan sebanyak 1 orang atau 1,2% menyatakan ragu-ragu, 54 orang atau 63,5% menyatakan setuju dan 30 orang atau 35,3% menyatakan sangat setuju. Nilai rata-rata sebesar 4,34 serta total responden 85 dengan

presentasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai setuju bahwa dana desa sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah sangat baik.

2. Pada butiran pernyataan X1.2 dari kuesioner yang disebar dan dianalisis menyatakan, pencatatan laporan keuangan di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan sudah sangat baik. Dapat digambarkan 1 orang atau 1,2% menyatakan ragu-ragu, 35 orang atau 41,2% menyatakan setuju dan 49 orang atau 57,6% menyatakan sangat setuju. Nilai rata-rata sebesar 4,58 serta total responden 45 dan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan sudah sangat baik. Dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang baik akan mengurangi tingkat kecurangan terhadap dana desa.
3. Pada butiran pernyataan X1.3 dari kuesioner yang yang disebar dan dianalisis menyatakan, penyajian laporan keuangan di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan sudah baik, dapat digambarkan sebanyak 1 orang atau 1,2% menyatakan ragu-ragu, 39 orang atau 45,9% menyatakan setuju dan 45 orang atau 52,9% menyatakan sangat setuju. Nilai rata-rata sebesar 4,53 dan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan

keuangan sudah baik dengan adanya pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

2. Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel Transparansi (X2)

Distribusi jawaban responden tentang variabel transparansi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Variabel Transparansi

Variabel	STS		TS		R		S		SS		Rata-rata	Total N	Total %
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
X2.1	0	0	0	0	0	0	36	42,4	49	57,6	4,58	85	100
X2.2	0	0	0	0	0	0	52	61,2	33	38,8	4,39	85	100
X2.3	1	1,2	0	0	2	2,4	50	58,8	32	37,6	4,32	85	100
X2.4	0	0	0	0	2	2,4	58	68,2	25	29,4	4,27	85	100

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari 85 responden untuk variabel transparansi pada tabel 4.4 yaitu :

1. Pada pernyataan X2.1 dari kuesioner yang disebar dan dianalisis menyatakan, mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi sudah sangat baik, dapat digambarkan sebanyak 36 orang atau 42,2% menyatakan setuju dan 49

orang atau 57,6% menyatakan sangat setuju. Nilai rata-rata sebesar 4,58 serta total responden 85 dan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sistem dan standarisasi sudah sangat baik pemerintah desa lebih transparan kepada masyarakat dengan cara mendapatkan akses lebih baik terhadap informasi desa.

2. Pada pernyataan X2.2 dari kuesioner yang disebar dan dianalisis menyatakan, penyediaan akses informasi sudah sangat baik. Dapat digambarkan 52 orang atau 61,2% menyatakan setuju dan 33 orang atau 38,8% menyatakan sangat setuju. Nilai rata-rata sebesar 4,39 serta total responden 85 dan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan akses informasi pada desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan sudah sangat baik yaitu dengan adanya informasi melalui papan informasi atau baliho yang di pasang di depan kantor desa.
3. Pada pernyataan X2.3 dari kuesioner yang disebar dan dianalisis menyatakan, mekanisme yang memfasilitasi pelayanan publik sudah sangat baik. Dapat digambarkan 1 orang atau 1,2% menyatakan sangat tidak setuju, 2 orang atau 2,4% menyatakan ragu-ragu, 50 orang atau 58,8% menyatakan setuju dan 32 orang atau 37,6% menyatakan sangat setuju. Nilai rata-rata sebesar 4,32 serta total responden 85 dan presentase 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa mekanisme yang memfasilitasi pelayanan publik sudah sangat baik yaitu dengan adanya website desa yang dapat diakses melalui jaringan internet.

4. Pada pernyataan X2.4 dari kuesioner yang disebar dan dianalisis menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan penyediaan informasi responden ragu-rau sebanyak 2 orang atau 2,4%, setuju sebanyak 58 orang atau 68,2% dan responden yang sangat setuju sebanyak 25 orang atau 29,4%. Dengan nilai rata-rata 4,27 serta presentase 100%. Menunjukkan bahwa responden setuju pelaporan dan penyediaan informasi di setiap desa di daerah Banggai Kepulauan sudah sangat baik.

3. Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Distribusi jawaban responden tentang variabel pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5

Variabel Pengelolaan Dana Desa

Variabel	STS		TS		R		S		SS		Rata-rata	Total N	Total %
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
Y1	1	1,2	0	0	0	0	35	41,2	49	57,6	4,54	85	100
Y2	0	0	0	0	0	0	51	60,0	34	40,0	4,40	85	100
Y3	0	0	0	0	1	1,2	36	42,4	48	56,5	4,55	85	100

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari 85 responden untuk variabel pengelolaan dana desa pada tabel 4.5 yaitu :

1. Indikator Y1 (pengalokasian sumber daya) menunjukkan bahwa responden setuju sebanyak 1 atau 1,2% menyatakan sangat tidak setuju, responden setuju sebanyak 35 orang atau 41,2% dan responden sangat setuju sebanyak 49 orang atau 57,6%. Dengan nilai rata-rata 4,54 serta presentase 100%. Menunjukkan bahwa responden sangat setuju pengalokasian sumber daya di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan telah tepat sasaran.
2. Indikator Y2 (operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas) menunjukkan bahwa responden setuju sebanyak 51 orang atau 60,0% dan responden yang sangat setuju sebanyak 34 orang atau 40,0%. Dengan nilai rata-rata 4,40 serta presentase 100%. Menunjukkan responden sangat setuju bahwa operasional kegiatan telah mendukung efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa.
3. Indikator Y3 (laporan pertanggungjawaban) menunjukkan bahwa responden ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 1,2%, responden setuju sebanyak 36 orang

atau 42,4% dan responden sangat setuju sebanyak 48 orang atau 56,5%. Dengan nilai rata-rata 4,55 serta presentase 100%. Menunjukkan responden sangat setuju bahwa laporan pertanggungjawaban telah dibuat dengan baik dan benar oleh bendahara desa.

1.3 Uji Kelayakan Data

1.3.1 Uji Validitas

Kriteria daftar pernyataan untuk bisa dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Untuk mengetahui r_{hitung} peneliti menggunakan alat bantu SPSS 16 sedangkan mencari r_{tabel} peneliti mencari dari tabel (terlampir) dengan mengetahui terlebih dahulu derajat kebebasannya.

Dengan kebebasan (*Degree of freedom*) dalam penelitian ini adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 85 responden, jadi besarnya $df = 85 - 2 = 83$ dengan @0,05 (5%). Maka di dapat r_{tabel} 0,1796. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	item pernyataan	Corrected Item – Total Correlation	R_{tabel}	Keterangan
Akuntab	X1.1	0,578	0,1796	Valid

ilitas				
	X1.2	0,601	0,1796	Valid
	X1.3	0,646	0,1796	Valid
Transpa ransi	X2.1	0,484	0,1796	Valid
	X2.2	0,680	0,1796	Valid
	X2.3	0,702	0,1796	Valid
	X2.4	0,449	0,1796	Valid
Pengelol aan Dana Desa	Y1	0,509	0,1796	Valid
	Y2	0,619	0,1796	Valid
	Y3	0,718	0,1796	Valid

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan di atas valid. Karena setiap item memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dari r_{tabel} yaitu 0,1796.

1.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana desa. Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan uji

statistik *Cronbach Alpha Coefficient (a)*. Hasil perhitungan uji reliabilitas disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient (a)</i>	Keterangan
X1	0,773	Valid
X2	0,769	Valid
Y	0,770	Valid

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner reliabel karena nilai *Cronbach Alpha Coefficient (a)* lebih dari 0,70.

1.4 Uji Asumsi Klasik

1.4.1 Uji Normalitas

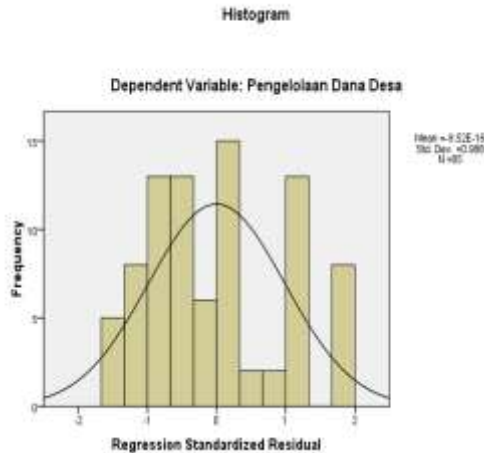
Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengkaji apakah data variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi telah berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data, penguji menggunakan pendekatan histogram dan pendekatan Kolmogorov-Smirnov.

1. Uji Normalitas Pendekatan Histogram

Pada pendekatan histogram, dikatakan variabel berdistribusi normal jika berbentuk lonceng yang tidak

menceng ke kiri atau ke kanan. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 4.3 Histogram



Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Pada grafik histogram pada gambar 4.3 terlihat bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak miring ke kiri ataupun ke kanan dan membentuk pola lonceng. Sehingga penyebaran datanya telah berdistribusi normal.

2. Normalitas Pendekatan Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas dengan pendekatan statistik Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	85
Normal Parameters ^a Mean	.0000000
Std. Deviation	.38638420
Most Extreme Absolute Differences	.117
Positive	.117
Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z	1.081
Asymp. Sig. (2-tailed)	.193

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar $0,193 > 0,05$. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data berdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana desa memiliki data yang berdistribusi normal.

1.4.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas berarti adanya hubungan yang sempurna, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Dasar untuk melihat suatu model yang tidak terkena multikolinearitas adalah dengan melihat besar *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tingkat *Tolerance*. Jika VIF > 10 dan *Tolerance* $< 0,1$, maka terkena multikolinearitas, tetapi jika VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,1$, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian ini. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	.421	2.378
	Transparansi	.421	2.378

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

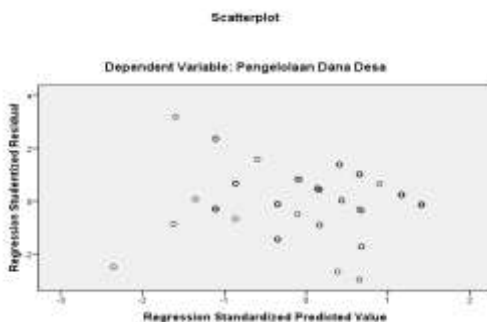
Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.9, ditampilkan bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terlihat adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen. Hal ini diketahui dengan melihat tabel yang terdapat nilai tolerance dan VIF. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel akuntabilitas sebesar 0,421 dan nilai VIF sebesar 2,378. Dan nilai tolerance variabel transparansi 0,421 dan nilai VIF sebesar 2,378. Dengan demikian nilai tolerance masing-masing variabel independen $> 0,1$ dengan nilai VIF < 10 . Maka berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai tolerance $> 0,01$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

1.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.4
Pendekatan Grafik Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas grafik Scatterplot yang disajikan pada gambar 4.4 dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

1.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel terikat (Y) yaitu Pengelolaan Dana Desa. Nilai koefisien regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Koefisien Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.707	.937		.754	.453
Akuntabilitas	.587	.099	.551	5.899	.000
Transparansi	.280	.078	.336	3.597	.001

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.707	.937		.754	.453
	Akuntabilitas	.587	.099	.551	5.899	.000
	Transparansi	.280	.078	.336	3.597	.001

a. Dependent Variable:

Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 4.10, dapat dirumuskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,707 + 0,587X_1 + 0,280X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan dana desa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

e = Standar error

berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Konstanta (a) = 0,707. Ini menunjukkan tingkat konstan, dimana jika variabel akuntabilitas dan transparansi sama dengan 0, maka pengelolaan dana desa di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan akan sebesar 0,707.
- b. Koefisien $\beta_1 (X_1) = 0,587$. Ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa atau dengan kata lain, jika variabel akuntabilitas dengan indikator alat pertanggungjawaban, pencatatan laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan, maka pengelolaan dana desa di Kabupaten Banggai Kepulauan akan meningkat sebesar 0,587 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien $\beta_2 (X_2) = 0,280$. Ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan kata lain jika variabel transparansi dengan indikator mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi, penyediaan akses informasi, mekanisme yang memfasilitasi pelayanan publik dan mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi ditingkatkan, maka pengelolaan dana desa di Kabupaten Banggai Kepulauan akan meningkat sebesar 0,280 dengan asumsi variabel lain tetap.

1.6 Pengujian Hipotesis

Pembuktian apakah variabel akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, baik secara simultan maupun parsial. Pembuktian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Uji F digunakan dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang meliputi akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa secara simultan.

1.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji t)

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik t (Uji t). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika tingkat signifikansi dibawah 0,5 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui t_{tabel} untuk $df = n - 2$ yaitu $df = 85 - 2 = 83$ dan tingkat signifikansi (α) = 5% maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,988. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11

**Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.707	.937		.754	.453
Akuntabilitas	.587	.099	.551	5.899	.000
Transparansi	.280	.078	.336	3.597	.001

a. Dependent Variable:

Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

1. Akuntabilitas (X_1)

Variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,899 sedangkan nilai t_{tabel} 1,988. Dengan demikian nilai t_{hitung} ($5,899$) $>$ t_{tabel} ($1,988$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan, yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Transparansi (X_2)

Variabel transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,597 sedangkan nilai t_{tabel} 1,988. Dengan demikian nilai t_{hitung} ($3,597$) $>$ t_{tabel} ($1,988$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap

pengelolaan dana desa pada desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan, yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima.

1.6.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas dan transparansi yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu pengelolaan dana desa.

Model hipotesis yang digunakan adalah :

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel pengelolaan dana desa.
- b. $H_a : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel pengelolaan dana desa. Hasil uji signifikan simultan F dapat dilihat pada tabel 4.12 :

Tabel 4.12

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.

1	R					
	eg					
	re	109.894	2	54.947	95.149	.000 ^a
	ssi					
	on					
	R					
	es					
	id	47.353	82	.577		
	ua					
	l					
	To					
	tal	157.247	84			

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Fhitung adalah 95,149 lebih besar dari pada 3,11 (Ftabel) dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai

Fhitung > Ftabel yang diperoleh dengan melihat tabel F, nilai Ftabel = F (k;n-k) = F (2; 85 – 2) = F (2;83). Maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,11. Dengan demikian diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (95,149 > 3,11). Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis maka Ha diterima dan Ho ditolak.

1.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.692	.760

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,692 atau 69,2% *Adjusted R Square* berkisar pada angka 1–0, dengan catatan semakin besar angka *Adjusted R Square* maka akan semakin kuat hubungan dari ketiga variabel dalam model regresi. Yaitu *AdjustedR Square* sebesar 0,692

berarti 69,2% variabel pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan 30,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

1.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Data dari penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner secara fisik kepada perangkat desa pada desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian data ini dikumpul dan dianalisis peneliti sehingga memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ini diterima karena berdasarkan hasil uji yang dilakukan peneliti bahwa untuk variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yaitu nilai untuk $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,899 > 1,988$). Karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara umum tanggapan responden sangat baik. Karena setiap pertanggungjawaban anggaran dana desa berdasarkan hukum

dan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk menghindari segala resiko yang timbul akibat adanya korupsi dan kolusi agar seluruh pegawai desa mematuhi hukum yang berlaku. Pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi karena kepala desa (kuasa pengguna anggaran) harus mempertanggungjawabkn sesuai dengan anggaran yang dialokasikan secara merata berdasarkan standar Permendagri yang telah ditetapkan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Karena berarti akuntabilitas pengelolaannya secara umum telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perencanaan DD telah dilakukan kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan baik ditingkat dusun, ditingkat desa, maupun ditingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan dari masyarakat, serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan dengan baik laporan keuangan yang telah dibuat. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ketika terjun langsung pertanggungjawaban pengelolaan DD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sebagai contoh perbaikan jalan raya, pembuatan jalan rabat, pengelolaan tempat wisata di beberapa

desa. Sedangkan pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya yakni melalui laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Akuntabilitas merupakan unsur yang sangat penting yang harus diterapkan pada setiap pelaporan keuangan. Akuntabilitas juga berpengaruh signifikan yang terdapat pada penelitiannya Risyia Umami dan kawan-kawan (2017) mengatakan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengelolaan dana desa serta mencegah terjadinya korupsi dan kolusi. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Ibnu Hajar (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

2. Hipotesis Kedua : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dari hasil analisis pengolahan data bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,597 > 1,988$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga H_2 diterima, maka berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengelolaan dana desa. Karena pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, diantaranya prinsip tersebut yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencairan dana desa, diadakannya musrenbangdes, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa). Semakin baik transparansi maka akan menciptakan akuntabilitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Hal ini mendukung teori dalam bukunya Liona Lalolo Krina (2003), mengatakan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Lebih lanjut lagi pada artikel yang di tulis Annisaningrum, yang mengatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Serta pada penelitian Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Raharjo (2016)

mengatakan bahwa di desa Bomo keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparansi (terbuka).

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Variabel	Hasil
1	Akuntabilitas (X ₁)	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa
2	Transparansi (X ₂)	Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan)”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel akuntabilitas berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dikatakan baik secara teknik maupun administratif. Pengelolaan seluruh dana desa mampu dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan secara rinci dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Jadi dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Variabel transparansi berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah transparan mengenai laporan

pertanggungjawaban serta pengelolaan dana desa, yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dana desa, pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) meunjukkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,692 berarti 69,2% variabel pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan 30,8% lainnya di jelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Sampel dalam penelitian ini adalah desa. Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan mencari responden yang benar-benar mau mengisi kuesioner. Takut atau belum memahami pertanyaan kuesioner sehubungan dengan variabel akuntabilitas dan transparansi menjadi alasan sebagian perangkat desa tidak bersedia menjadi responden.
2. Jarak antar desa sangat jauh dengan jarak tempuh 8 jam perjalanan dan juga ada yang harus naik perahu. Serta penelitian kuantitatif dengan unit analisis organisasi yang mengharuskan satu desa hanya satu responden.

1.3 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa-desa di kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebagai berikut :

- a. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti masih terbatas dan pertanyaannya masih kurang memadai, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.
- b. Bagi peneliti selanjutnya menambahkan variabel selain pengelolaan dana desa, akuntabilitas, dan transparansi dalam penelitian selanjutnya sehingga mampu memberikan temuan empiris baru.
- c. Sebaiknya menggunakan indikator lain dalam penelitian sesuai yang diperlukan serta mampu berinovasi dengan kuesioner yang sesuai dengan kondisi penelitian, sehingga mampu memberikan jawaban yang lebih valid dan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tyasminingsih. *Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo*, Skripsi, 2016
- Afifatun, Nisa. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Skripsi, 2016
- Ali Baroroh. *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS 15*, Jakarta : Alex Media Mumputindo, 2008
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Abdullah, M. Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013
- Chomariyah, dkk. *Keuangan Desa Pesisir, Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif*, Malang: Inteligencia Media, 2015
- Danang, Suyanto, *Praktik Riset Perilaku Konsumen (Teori Kisioner, Alat, dan Analisis Data)*, Yogyakarta : CAPS, Cet 1, 2014
- Dermawan, Wibisono. *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Fauzi, Mochammad. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pres, 2009

Fajri, Rahmi dkk, *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Malang, 2015

Fordebi, ADESy. *Akuntansi Syariah, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, 2016

Hoesada, Jan, *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016

<http://radarsultengonline.com/2017/08/03/rp-8-miliar-dana-desa-tidak-sesuai-aspirasi-desa/>. Di akses 21 September 2018.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, dan Penelitian gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Nico, Adrianto. *Transpaaransi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Rahayu Srikandi. "Pengeritian dan Prinsip Good Governance"

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/12/pengertian-dan-prinsip-good-governance.html>, diakses 27 Juli 2018.

Rambat Lupiyoadi, Ridho Bramulya Iksan. *Praktikum Riset Bisnis*, Jakarta : Salmeba Empat, 2015

Rizky, Amalia Sugista, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa*, Skripsi, 2017

- Santoso, Singgih. "*Menguasai SPSS 21 di Era Informasi*". Jakarta : PT. ELEK Media Komputundo, 2013
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Sofar Silaen, Widiyono. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan tesis*, Jakarta: in Media, 2013
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2016
- Umami, Risya dkk. *6 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 2017
- Ulum, I. *Akuntansi Sektor Publik* Malang: UMMPRESS, 2010
- Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Wr, Wb..

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan bapak/ibu mengisi kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Rifkayanti Amrullah
NIM : 1505046040
Jurusan/Fakultas : S1 Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis
Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Kuesioner ini merupakan bagian dari pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)”**

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada bapak/ibu/saudara/i untuk berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan bapak/ibu/saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap desa. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian.

Wassalamualaikum Wr, Wb..

Peneliti

Rifkayanti Amrullah

KUESIONER PENELITIAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Desa :

PEDOMAN PENGISIAN

Berikan tanda (√) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia.

Keterangan :

Jawaban	Keterangan	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
RG	Ragu-ragu	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

Akuntabilitas (X_1)

Pada bagian ini bapak/ibu diharapkan memberikan penilaian mengenai akuntabilitas pertanggungjawaban desa.

Pernyataan	Penilaian				
	ST	TS	RG	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Laporan keuangan desa telah					

digunakan sebagai alat pertanggungjawaban masyarakat					
2. Semua jenis pendapatan dan pengeluaran desa telah tercatat dengan baik dalam laporan keuangan					
3. Laporan keuangan desa telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

Transparansi (X₂)

Pada bagian ini bapak/ibu diharapkan memberikan penilaian mengenai transparansi desa terhadap masyarakat.

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	RG	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rencana sumber dan penggunaan dana desa telah di musyawarakan melalui mekanisme musrembang					
2. Pihak desa telah menyediakan akses terhadap informasi mengenai rencana sumber dan penggunaan dana desa					

3. Laporan pertanggungjawaban dana desa telah di publikasikan kepada masyarakat					
4. Informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan desa telah dapat diakses masyarakat melalui website atau papan pengumuman					

Pengelolaan Dana Desa

Pada bagian ini bapak/ibu diharapkan memberikan penilaian mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	RG	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengelolaan dana desa telah melalui perencanaan sesuai dengan ketentuan					
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan sebelum transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.					

3. Bendahara desa telah membuat laporan pertanggungjawaban desa					
---	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 2

Tabel Data Hasil Kuesioner

NO RESP	AKUNTABILITAS			SKOR TOTAL X1	NO RESP	TRANSPARANSI				SKOR TOTAL X2	NO RESP	KEUANGAN DESA			SKOR TOTAL Y
	X1.1	X1.2	X1.3			X2.1	X2.2	X2.3	X2.4			Y1	Y2	Y3	
1	4	4	4	12	1	5	4	4	4	17	1	5	4	4	13
2	4	4	4	12	2	5	4	4	4	17	2	5	4	4	13
3	5	5	5	15	3	5	4	4	4	17	3	5	4	4	13
4	5	5	5	15	4	5	4	4	4	17	4	5	4	4	13
5	4	4	4	12	5	4	4	4	4	16	5	4	4	4	12
6	4	5	5	14	6	5	5	4	5	19	6	5	5	5	15
7	5	5	5	15	7	5	5	5	4	19	7	5	5	5	15
8	5	5	5	15	8	5	5	5	4	19	8	5	5	5	15
9	5	5	5	15	9	5	5	5	4	19	9	5	5	5	15
10	5	5	5	15	10	5	5	5	4	19	10	5	5	5	15
11	4	4	4	12	11	4	4	4	4	16	11	4	4	4	12
12	4	4	4	12	12	4	4	4	4	16	12	4	4	4	12
13	4	4	4	12	13	4	4	4	4	16	13	4	4	4	12
14	5	4	4	13	14	5	4	4	4	17	14	4	4	4	12
15	5	5	5	15	15	5	5	5	5	20	15	5	5	5	15
16	5	5	5	15	16	5	5	5	4	19	16	5	5	5	15
17	5	5	5	15	17	5	5	5	4	19	17	5	5	5	15
18	5	5	5	15	18	5	5	5	4	19	18	5	5	5	15
19	5	5	5	15	19	5	5	5	4	19	19	5	5	5	15
20	5	5	5	15	20	5	5	5	5	20	20	5	5	5	15
21	5	5	5	15	21	5	5	5	5	20	21	5	5	5	15
22	5	5	5	15	22	5	5	5	5	20	22	5	5	5	15
23	5	5	5	15	23	5	5	5	5	20	23	5	5	5	15
24	4	5	4	13	24	5	4	4	5	18	24	5	4	5	14
25	5	4	4	13	25	4	4	4	4	16	25	4	5	5	14
26	5	4	5	14	26	4	4	4	5	17	26	4	4	5	13
27	5	5	5	15	27	5	5	5	5	20	27	5	5	5	15
28	5	5	5	15	28	5	5	5	5	20	28	5	5	5	15

29	5	5	5	15	29	4	4	4	4	16	29	5	4	5	14
30	5	5	5	15	30	4	4	4	4	16	30	5	4	5	14
31	4	4	4	12	31	4	4	4	4	16	31	5	4	5	14
32	4	4	4	12	32	4	4	4	4	16	32	5	4	5	14
33	4	4	4	12	33	4	4	4	4	16	33	5	4	5	14
34	4	4	4	12	34	4	4	4	4	16	34	4	4	4	12
35	4	4	4	12	35	4	4	4	4	16	35	4	4	4	12
36	4	4	4	12	36	4	4	4	4	16	36	4	4	4	12
37	4	4	4	12	37	4	4	4	4	16	37	4	4	4	12
38	4	4	4	12	38	4	4	4	4	16	38	4	4	4	12
39	5	5	5	15	39	4	4	4	5	17	39	5	4	5	14
40	4	5	5	14	40	4	4	4	4	16	40	5	4	5	14
41	4	5	4	13	41	5	5	5	4	19	41	4	5	5	14
42	4	5	4	13	42	5	5	5	4	19	42	4	5	5	14
43	5	5	5	15	43	5	5	5	4	19	43	5	5	5	15
44	4	4	4	12	44	4	4	4	4	16	44	4	4	4	12
45	4	4	4	12	45	4	4	4	4	16	45	4	4	4	12
46	3	4	4	11	46	4	4	1	4	13	46	1	4	4	9
47	4	4	4	12	47	5	4	4	4	17	47	4	4	4	12
48	4	3	4	11	48	4	4	4	4	16	48	4	4	3	11
49	4	5	4	13	49	5	5	5	5	20	49	4	4	4	12
50	4	4	5	13	50	5	4	4	4	17	50	4	4	4	12
51	4	5	5	14	51	4	5	5	5	19	51	5	5	5	15
52	4	5	5	14	52	4	5	5	5	19	52	5	5	5	15
53	4	5	5	14	53	5	4	4	5	18	53	5	5	5	15
54	4	5	5	14	54	4	4	4	5	17	54	4	5	5	14
55	4	5	5	14	55	5	5	5	5	20	55	5	5	5	15
56	4	4	4	12	56	4	4	4	4	16	56	4	4	4	12
57	4	4	4	12	57	4	4	4	4	16	57	4	4	4	12
58	5	5	4	14	58	5	4	5	5	19	58	4	4	4	12
59	4	4	5	13	59	5	4	4	4	17	59	4	4	4	12
60	4	4	5	13	60	5	4	4	4	17	60	4	4	4	12
61	4	4	4	12	61	4	4	4	4	16	61	4	4	4	12
62	4	4	4	12	62	5	4	3	3	15	62	4	4	4	12
63	4	4	4	12	63	5	4	4	4	17	63	5	4	4	13

64	5	5	5	15	64	5	5	5	5	20	64	5	5	5	15
65	4	5	4	13	65	5	4	4	4	17	65	5	4	4	13
66	5	5	5	15	66	5	5	5	4	19	66	5	5	5	15
67	4	5	3	12	67	4	4	3	3	14	67	5	4	5	14
68	5	5	5	15	68	5	5	5	5	20	68	5	5	5	15
69	5	5	5	15	69	5	5	5	5	20	69	5	5	5	15
70	4	5	4	13	70	5	4	4	4	17	70	5	4	4	13
71	4	5	5	14	71	4	5	4	4	17	71	5	4	5	14
72	4	5	5	14	72	4	5	4	4	17	72	4	4	5	13
73	4	4	5	13	73	4	5	4	5	18	73	4	4	5	13
74	4	5	4	13	74	5	5	4	5	19	74	5	4	5	14
75	4	5	5	14	75	5	4	5	4	18	75	5	5	5	15
76	4	5	5	14	76	5	4	5	5	19	76	5	5	5	15
77	4	5	5	14	77	5	5	5	4	19	77	4	5	5	14
78	4	5	5	14	78	5	4	5	4	18	78	5	5	5	15
79	5	5	5	15	79	5	5	5	5	20	79	5	5	5	15
80	4	4	4	12	80	4	4	4	4	16	80	4	4	4	12
81	4	4	4	12	81	4	4	4	4	16	81	4	4	4	12
82	4	4	4	12	82	4	4	4	4	16	82	4	4	4	12
83	4	4	4	12	83	4	4	4	4	16	83	4	4	4	12
84	4	5	4	13	84	5	4	4	4	17	84	5	4	4	13
85	4	4	5	13	85	5	4	4	4	17	85	5	4	4	13

LAMPIRAN 3

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	item pernyataan	Corrected Item – Total Correlation	R_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,578	0,1796	Valid
	X1.2	0,601	0,1796	Valid
	X1.3	0,646	0,1796	Valid
Transparansi	X2.1	0,484	0,1796	Valid
	X2.2	0,680	0,1796	Valid
	X2.3	0,702	0,1796	Valid
	X2.4	0,449	0,1796	Valid
Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,509	0,1796	Valid
	Y2	0,619	0,1796	Valid
	Y3	0,718	0,1796	Valid

Correlations X1

		X1.1	X1.2	X1.3	TOTAL_X 1
X1.1	Pearson Correlation	1	.483	.541	.808
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	85	85	85	85
X1.2	Pearson Correlation	.483	1	.570	.828
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	85	85	85	85
X1.3	Pearson Correlation	.541	.570	1	.852
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	85	85	85	85
TOTAL_X 1	Pearson Correlation	.808	.828	.852	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	9.08	.862	.578	.726
X1.2	8.86	.813	.601	.702
X1.3	8.91	.777	.646	.651

Correlations X2

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X 2
X2.1	Pearson Correlation	1	.439	.503	.228	.698
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.036	.000
	N	85	85	85	85	85
X2.2	Pearson Correlation	.439	1	.665	.443	.824
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85

X2.3	Pearson Correlation	.503	.665	1	.437	.872
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	85	85	85	85	85
X2.4	Pearson Correlation	.228	.443	.437	1	.674
	Sig. (2-tailed)	.036	.000	.000		.000
	N	85	85	85	85	85
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.698	.824	.872	.674	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85	85

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

X2.1	12.98	1.809	.484	.756
X2.2	13.16	1.615	.680	.660
X2.3	13.24	1.277	.702	.637
X2.4	13.28	1.848	.449	.772

Correlations Y

		Y1	Y2	Y3	TOTAL_ Y
Y1	Pearson Correlation	1	.408	.528	.808
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	85	85	85	85
Y2	Pearson Correlation	.408	1	.702	.816
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	85	85	85	85
Y3	Pearson Correlation	.528	.702	1	.877
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	85	85	85	85

TOTAL	Pearson				
_Y	Correlation	.808	.816	.877	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	8.95	.879	.509	.824
Y2	9.09	1.015	.619	.683
Y3	8.94	.889	.718	.568

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient (a)</i>	Keterangan
X1	0,773	Valid
X2	0,769	Valid
Y	0,770	Valid

Reliability Statistics Y

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	3

Reliability Statistics X1

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	3

Reliability Statistics X2

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	4

LAMPIRAN 4

Karakteristik Responden

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia
N	Valid	85	85
	Missing	0	0

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	64	75.3	75.3	75.3
	Perepuan	21	24.7	24.7	100.0
Total		85	100.0	100.0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-30 Tahun	20	23.5	23.5	23.5
31-40 Tahun	31	36.5	36.5	60.0
41-60 Tahun	34	40.0	40.0	100.0
Total	85	100.0	100.0	

Frekuensi Jawaban Responden

Descriptives X1 (Akuntabilitas)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	85	3	5	4.34	.501
X1.2	85	3	5	4.56	.522
X1.3	85	3	5	4.52	.526
Valid N (listwise)	85				

Frequency Table

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.2	1.2	1.2
4	54	63.5	63.5	64.7
5	30	35.3	35.3	100.0
Total	85	100.0	100.0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.2	1.2	1.2
4	35	41.2	41.2	42.4
5	49	57.6	57.6	100.0
Total	85	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	3	1	1.2	1.2	1.2
	4	39	45.9	45.9	47.1
	5	45	52.9	52.9	100.0
Total		85	100.0	100.0	

Frequencies X2 (Transparansi)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	85	4	5	4.58	.497
X2.2	85	4	5	4.39	.490
X2.3	85	1	5	4.32	.640
X2.4	85	3	5	4.27	.497
Valid N (listwise)	85				

Frequency Table

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	4	36	42.4	42.4	42.4
	5	49	57.6	57.6	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	52	61.2	61.2	61.2
	5	33	38.8	38.8	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.2	1.2	1.2
	3	2	2.4	2.4	3.5
	4	50	58.8	58.8	62.4
	5	32	37.6	37.6	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	2	2.4	2.4	2.4
4	58	68.2	68.2	70.6
5	25	29.4	29.4	100.0
Total	85	100.0	100.0	

Descriptives Y (Pengelolaan Dana Desa)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	85	1	5	4.54	.628
Y2	85	4	5	4.40	.493
Y3	85	3	5	4.55	.523
Valid N (listwise)	85				

Frequency Table

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.2	1.2	1.2
4	35	41.2	41.2	42.4
5	49	57.6	57.6	100.0
Total	85	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	51	60.0	60.0	60.0
5	34	40.0	40.0	100.0
Total	85	100.0	100.0	

Y3

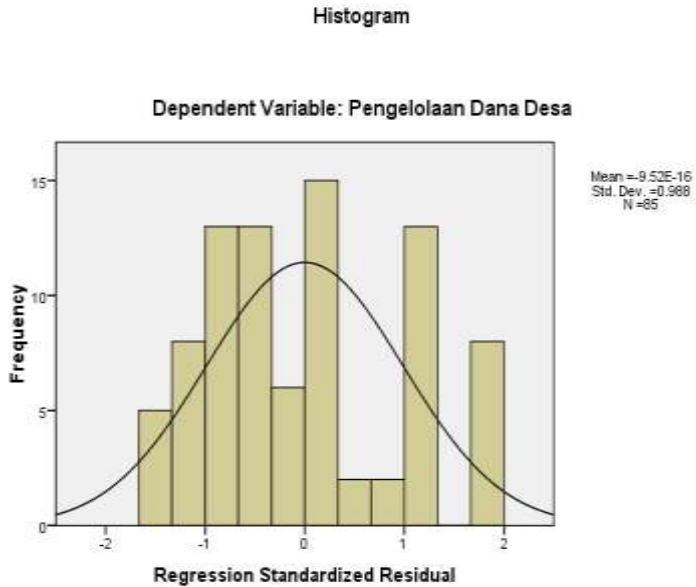
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.2	1.2	1.2

4	36	42.4	42.4	43.5
5	48	56.5	56.5	100.0
Total	85	100.0	100.0	

LAMPIRAN 5

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000

	Std. Deviation	.38638420
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		1.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.193

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Multikolinearitas

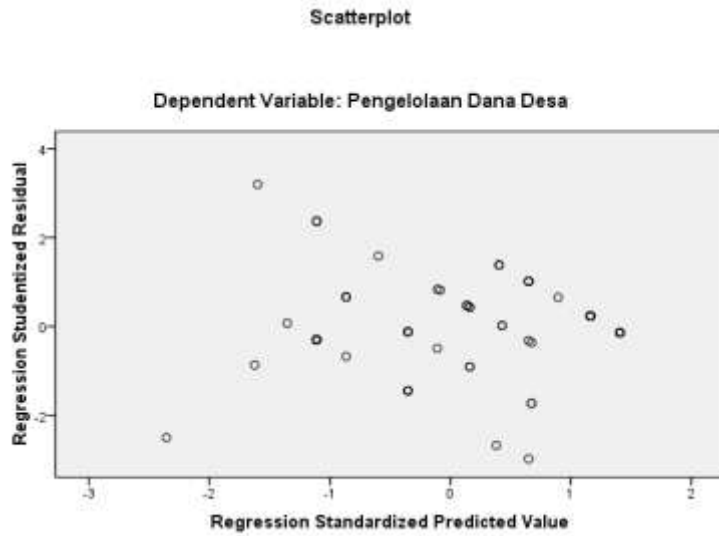
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.707	.937		.754	.453		
Akuntabilitas	.587	.099	.551	5.899	.000	.421	2.378
Transparansi	.280	.078	.336	3.597	.001	.421	2.378

a. Dependent Variable:

Pengelolaan Dana Desa

c. Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 6
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.707	.937		.754	.453
Akuntabilitas	.587	.099	.551	5.899	.000
Transparansi	.280	.078	.336	3.597	.001

a. Dependent Variable:
 Pengelolaan Dana Desa

LAMPIRAN 7
Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji *t*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.707	.937		.754	.453
	Akuntabilitas	.587	.099	.551	5.899	.000
	Transparansi	.280	.078	.336	3.597	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan
Dana Desa

b. Uji Simultan (Uji *F*)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.894	2	54.947	95.149	.000 ^a
	Residual	47.353	82	.577		
	Total	157.247	84			

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.894	2	54.947	95.149	.000 ^a
	Residual	47.353	82	.577		
	Total	157.247	84			

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.692	.760

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

LAMPIRAN 8

Surat Izin Penelitian


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JL. BUKIT TRIKORA NO. 13 TELP. (0462) 2222102 SALAKAN KODE POS 94765</p>
<hr/>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 570/02/RF/DPM&PTSP/1/2019	
Membaca	Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Nomor : B-3517/Un.10.5D/TL.00/12/2018, Tanggal 20 Desember 2018, Perihal Surat Pengantar Izin Riset
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 tentang pedoman penelitian dan pengabdian lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;4. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 17 Tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 10 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 70 Tahun 2017 tentang Pendukung Kewenangan / Peningkatan / Pertenan dan Non Pertenan Kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Mempertimbangkan	Proposal Yang bersangkutan
Menyatakan bahwa pada prinsipnya memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Rekomendasi Penelitian kepada :	
Nama	RIFKAYANTI AMRULLAH
NPM	1505046040
Program Studi	Akuntansi Syariah
Pekerjaan	Pelajar Mahasiswa
Maksud	Penelitian S-1
Judul	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Tujuan Penelitian	Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Lokasi Penelitian	Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan
Lama Penelitian	3 Bulan (11 Januari s.d 11 April 2019)
Pengikut	-
Biaya	Rp. 0,-

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada pihak yang berwenang di Daerah yang dituju.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Penelitian yang dimaksud.
3. Harus mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengindahkan segala tata krama kehidupan masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati/Banggai Kepulauan c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan.
5. Rekomendasi ini kami cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat kekeliruan / pemegang surat ini tidak mematuhi / mengindahkan segala ketentuan diatas.

Salatikan, 11 Januari 2019

A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIS


UNGKE SOLANY, S.Sos
NIP. 19620806 190903 1 020

DAFTAR KAPALAH YAK

1. Kabupaten Sulawesi Tengah di Pulo
2. Kepala DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah di Pulo
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan (Pengantar Laporan)
4. Kepala Desa Kumbuduhan di Kumbuduhan
5. Kepala Desa Lappih di Lappih
6. Kepala Desa Alagon di Alagon
7. Kepala Desa Tosa di Tosa
8. Kepala Desa Sankala di Sankala
9. Kepala Desa Saka di Saka
10. Kepala Desa Saka di Saka
11. Kepala Desa Saka di Saka
12. Kepala Desa Saka di Saka
13. Kepala Desa Saka di Saka
14. Kepala Desa Saka di Saka
15. Kepala Desa Saka di Saka
16. Kepala Desa Saka di Saka
17. Kepala Desa Saka di Saka
18. Kepala Desa Saka di Saka
19. Kepala Desa Saka di Saka
20. Kepala Desa Saka di Saka
21. Kepala Desa Saka di Saka
22. Kepala Desa Saka di Saka
23. Kepala Desa Saka di Saka
24. Kepala Desa Saka di Saka
25. Kepala Desa Saka di Saka
26. Kepala Desa Saka di Saka
27. Kepala Desa Saka di Saka
28. Kepala Desa Saka di Saka
29. Kepala Desa Saka di Saka
30. Kepala Desa Saka di Saka
31. Kepala Desa Saka di Saka
32. Kepala Desa Saka di Saka
33. Kepala Desa Saka di Saka
34. Kepala Desa Saka di Saka
35. Kepala Desa Saka di Saka

41. Kepala Desa Tobing di Tobing
42. Kepala Desa Ababawang di Ababawang
43. Kepala Desa Baboniring di Baboniring
44. Kepala Desa Yaki di Yaki
45. Kepala Desa Kembariga di Foyobunge
46. Kepala Desa Picaudi di Picaudi
47. Kepala Desa Pigi di Pigi
48. Kepala Desa Terikah di Terikah
49. Kepala Desa Lalendy di Lalendy
50. Kepala Desa Mertonian di Mertonian
51. Kepala Desa Guno di Guno
52. Kepala Desa Gumbung di Gumbung
53. Kepala Desa Taji di Taji
54. Kepala Desa Bakalinga di Bakalinga
55. Kepala Desa Babung di Babung
56. Kepala Desa Kapubung di Kapubung
57. Kepala Desa Moting di Moting
58. Kepala Desa Lenda di Lenda
59. Kepala Desa Lending di Lending
60. Kepala Desa Chai di Chai
61. Kepala Desa Talamending di Talamending
62. Kepala Desa Apal di Apal
63. Kepala Desa Daji di Daji
64. Kepala Desa Dabayin di Dabayin
65. Kepala Desa Derasul di Derasul
66. Kepala Desa Derasul di Derasul
67. Kepala Desa Derasul di Derasul
68. Kepala Desa Alanda di Alanda
69. Kepala Desa Selangora di Selangora
70. Kepala Desa Liang di Liang
71. Kepala Desa Mandukan di Mandukan
72. Kepala Desa Okamal di Okamal
73. Kepala Desa Popotika di Popotika
74. Kepala Desa Tomboni di Tomboni
75. Kepala Desa Lema- Lema Bangin di Lema- Lema Bangin
76. Kepala Desa Lema- Lema Darat di Lema- Lema Darat
77. Kepala Desa Hekabin di Hekabin
78. Kepala Desa Humber di Humber
79. Kepala Desa Labangin di Labangin
80. Kepala Desa Labakian di Labakian
81. Kepala Desa Labangin di Labangin
82. Kepala Desa Lumbi- lumbi di Lumbi- lumbi
83. Kepala Desa Malingging di Malingging
84. Kepala Desa Painsat di Painsat
85. Kepala Desa Painsat di Painsat
86. Kepala Desa Peling- Lelano di Peling- Lelano
87. Kepala Desa Sene di Sene
88. Kepala Desa Tabela di Tabela
89. Kepala Desa Lili- Lili di Lili- Lili
90. Kepala Desa Lili- Lili di Lili- Lili
91. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walailoko Jember di Jember

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifkayanti Amrullah
Tempat, Tanggal Lahir : Lopito, 12 Desember 1995
Alamat Asal : Jl. Mawar, Lopito, Totikum, Banggai
Kepulauan, Sulawesi Tengah
Alamat Sekarang : Jl. Stasiun Jerakah No. 18 Jerakah, Tugu,
Semarang
Email : amrullah.rifka@gmail.com

Jenjang pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. SD. Negeri Lopito
2. MTs. Negeri Totikum
3. MA. Asy-Syifaa Totikum

B. Pendidikan Non Formal

1. Taman Pendidikan Al-Qur'an Baburrahman Tahun 2000-2008
2. Olahraga Karate di Dojo INKANAS Bangkep Tahun 2000 S/D
Sekarang
3. Olahraga Karate di BKC UIN Walisongo Tahun 2015-2019